

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anies Jangan 'Umpetin' Anggaran

## □ Dibuka Agar Warga Ikut Awasi

**JAKARTA (Pos Kota)** – Gubernur Anies Baswedan diminta tidak 'mengumpetin' draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Permintaan ini agar warga bisa mengawasi anggaran daerahnya.

Desakan ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang mengaku belum menerima draf KUA-PPAS yang direvisi Anies. "Jangankan publik, saat ini Dewan saja tidak pegang draf KUA-PPAS itu," tegasnya, Selasa (5/11).

Menurut Prasetyo, publik harus tahu program dan anggaran yang janggal itu dari mana asalnya. Anies harus membuka biar publik bisa mengawasi. Merujuk hal itu, Prasetyo segera menyurati gubernur agar dokumen tersebut dibuka. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku hingga kini belum menerima draf KUA-PPAS yang direvisi Anies.

Pria yang akrab disapa Pras ini mengatakan, hak penganggaran ada di DPRD. Dia pun merasa bertanggung jawab jika anggaran yang janggal itu sampai lolos.

Makanya, sambung Pras, dari sekarang bila ada anggaran yang dianggap janggal harus segera diluruskan dengan pembahasan bersama. Agar alokasi anggaran itu matang dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke gubernur agar dokumen itu dibuka," ucapnya.

### SETELAH PEMBAHASAN

Menanggapi permintaan Dewan, Anies mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI Jakarta saat eksekutif dan legislatif telah rampung membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anies mengaku akan lebih fokus menyisir dan mengoreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. "Setelah tuntas pasti akan kami unggah agar nantinya tidak menimbulkan polemik," kilahnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta terpaksa merevisi besaran APBD akibat defisit anggaran. Dari usulan Rp95,99 triliun diturunkan menjadi Rp89,4 triliun. Adanya penurunan tersebut maka seluruh mata anggaran harus dikoreksi.

Tidak hanya itu, polemik anggaran berlanjut dengan ditemukannya beberapa alokasi yang dinilai janggal. Di antaranya pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan honor konsultan bedah kampung diajukan sebesar Rp556 juta untuk setiap RW.

(john/ruh/st)